

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PASAR DATAH MANUAH KOTA
PALANGKA RAYA**

Jurnal

**Disusun oleh :
Herlin Jaen Young
21.11.425125**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, ADMINISTRASI
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ilmiah yang berjudul : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Datah Manuah Kota Palangka Raya

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam mengatur dan menata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di kawasan Pasar Datah Manuah. Penulis berharap hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan penataan ruang kota yang lebih humanis dan efektif.

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Rahmat Hidayat, S.H., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, atas segala dukungan fasilitas dan kebijakan akademik yang diberikan.
2. Bapak/Ibu Kaprodi Sholahuddin Shoum Abdurrohman, S.Sos., M.A.P, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, yang telah memberikan arahan dan koordinasi selama masa studi dan penelitian.
3. Dosen pembimbing Bapak M. Anzarach Pratama, S.A., M.A.P, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, saran, serta kritik membangun yang sangat berharga bagi penyempurnaan artikel ini.
4. Satpol PP kota Palangka Raya, yang telah memberikan izin dan mau berpartisipasi selama proses penelitian.
5. Orang Tua, Keluarga, dan seluruh teman sejawat dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR DATAH MANUAH KOTA PALANGKA RAYA

Implementation Of The Street Vendor Regulation Policy At Datah Manuah Market In Palangka Raya City

Nama Penulis : Herlin Jaen Young (21.11.425125)

Afiliasi Penulis, Palangka raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia
Email:

herlinjaenyoung@gmail.com

Abstrak

Kota Palangka Raya memprioritaskan terwujudnya moto "Kota Cantik, Bersih dan Aman", namun realitas di lapangan menunjukkan maraknya PKL di Jalan Yos Sudarso menjadi tantangan utama. Keberadaan PKL di lokasi tersebut menimbulkan konflik tata ruang, kemacetan, dan masalah sanitasi yang parah. Meskipun Pemkot telah merespons dengan mengeluarkan Perda No. 13 Tahun 2009 dan No. 04 Tahun 2013, upaya relokasi, seperti ke Pasar Mini Datah Manuah, dinilai belum berhasil dan memicu *revolving door problem*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Yos Sudarso, dengan berfokus pada faktor-faktor penghambat struktural dan disposisional yang menyebabkan ketidakefektifan pencapaian visi kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Historis- Komparatif, Kerangka analisis teoritis menggunakan variabel kunci implementasi serta teori kinerja kebijakan William N. Dunn dan Grindle untuk mengkategorikan sumber kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi merupakan gabungan dari kegagalan desain kebijakan dan kinerja kelembagaan. Kesenjangan implementasi di Jalan Yos Sudarso merupakan siklus kegagalan yang terlembaga karena penyediaan lahan saja tidak cukup. Kebijakan penataan PKL hanya akan berhasil jika disertai insentif ekonomi yang kuat, perencanaan tata ruang yang strategis, dan dukungan promosi yang berkelanjutan agar lokasi binaan menjadi tujuan konsumen, bukan sekadar tempat pembuangan.

Kata Kunci:

Kata kunci 1 : implementasi kebijakan

Kata kunci 2 : Pedagang Kaki Lima

Kata kunci 3 : Resistensi Rasional

Kata kunci 4 :Kesenjangan Implementasi

Kata Kunci 5 : Pasar Datah Manuah

Kata kunci 6 : William N. Dunn

Keywords:

Keyword 1: Policy

Implementation Keyword 2: Street Vendors

Keyword 3: Rational Resistance

Keyword 4: Implementation Gap

Keyword 5: Datah Manuah Market

Keyword 6: William N. Dunn

Abstract

*Palangka Raya City prioritizes the realization of the motto 'Beautiful, Clean, and Safe City', but the reality on the ground shows that the proliferation of Street Vendors (PKL) on Jalan Yos Sudarso has become a major challenge. The presence of PKL in that location creates spatial planning conflicts, congestion, and severe sanitation problems. Although the City Government (Pemkot) has responded by issuing Regional Regulations (Perda) No. 13 of 2009 and No. 04 of 2013, relocation efforts, such as to Pasar Mini Datah Manuah, are deemed unsuccessful and trigger the revolving door problem. This study aims to critically analyze the implementation of the Street Vendor arrangement policy on Jalan Yos Sudarso, focusing on the structural and dispositional inhibiting factors that cause the suboptimal achievement of Palangka Raya city's vision. The research employs a **Qualitative Method with a Historical-Comparative approach**. The theoretical analysis framework uses key implementation variables as well as the policy performance theories of **William N. Dunn** and **Grindle (Policy Content)** to categorize the sources of the gap. The research results indicate that the implementation gap is a combination of policy design failure and institutional performance failure. The implementation gap on Jalan Yos Sudarso represents an institutionalized cycle of failure because **the provision of land alone is not enough**. The PKL arrangement policy will only succeed if accompanied by strong economic incentives, strategic spatial planning, and sustained promotional support so that the fostered location becomes a consumer destination, not merely a disposal site*